

PENGARUH KEMISKINAN DAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN TERHADAP ANGKA PARTISIPASI KASAR SEKOLAH MENENGAH ATAS DI INDONESIA TAHUN 2015-2019

Herlith

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
e-mail: herlith@unj.ac.id

Aditya Pratama

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
e-mail: adityapratama@unj.ac.id

Rzkia Ramadanti

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
e-mail: rizkiaramadanti@gmail.com

ABSTRAK

Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator partisipasi sekolah yang menunjukkan keadaan yang sesungguhnya pada suatu jenjang tanpa melihat batasan umur,. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan dan alokasi anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi kasar tingkat SMA di Indonesia tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan teknik analisis jalur dengan data panel model fixed effect. Penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar tingkat SMA di Indonesia. Lalu, alokasi anggaran pendidikan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar tingkat SMA di Indonesia. Sedangkan alokasi anggaran pendidikan memiliki pengaruh langsung negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Kata kunci: **Angka Partisipasi Kasar, Kemiskinan dan Alokasi Anggaran Pendidikan.**

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan manusia agar nantinya mampu menjalankanperannya di masyarakat. Daya saing suatu bangsa dapat ditingkatkan melalui pembangunan pendidikan yang pada

akhirnya dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Keberhasilan program pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam pendidikan dapat diukur oleh angka partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan fasilitas pendidikan. Terdapat dua tolak ukur untuk melihat angka partisipasi sekolah yaitu angka partisipasi sekolah kasar (APK) dan angka partisipasi sekolah murni (APM). Perbedaan antara keduanya ialah perbedaan ketentuan mengenai standar usia dalam setiap jenjang pendidikan.

Meningkatnya angka partisipasi kasar pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu sasaran pembangunan pendidikan dalam RPJMN 2015-2019. Dalam Buku I RPJMN 2015-2019 tertuang bahwa target 2019 untuk APK SD ialah 114,1 untuk APK SMP 106,9 dan untuk APK SMA 91,6 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014). Melihat dari data APK 2019 menunjukkan bahwa sasaran pembangunan pendidikan RPJM 2015-2019 masih belum tercapai.

Angka Partisipasi Kasar sekolah menengah yang belum mencapai 100% setiap tahunnya yang menunjukkan masih ada masyarakat yang menghadapi kendala untuk mendapatkan pendidikan menengah. Angka partisipasi kasar pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki nilai yang paling rendah jika dibandingkan dengan APK pada SMP dan SD. Hal ini sejalan dengan masih belum adanya regulasi Wajib Belajar 12 tahun yang menyebabkan masyarakat belum wajib berpendidikan minimal sekolah menengah atas.

Angka partisipasi kasar jenjang SMA yang rendah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti partisipasi anak dalam sekolah yang tidak luput dari kondisi sosial ekonomi keluarga. Pendapatan yang diterima oleh orang tua berperan penting dalam keputusan anak untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMA/ sederajat, demikian juga pendidikan orang tua, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, akan menentukan pencapaian pendidikan anaknya (BAPPEDA 2018). Pernyataan ini di dukung oleh publikasi milik Badan Pusat Statistika yang menjelaskan bahwa

dengan semakin meningkatnya jenjang pendidikan, akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan finansial (Badan Pusat Statistik, 2018).

Tabel 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Sederajat Menurut Kelompok Pendapatan

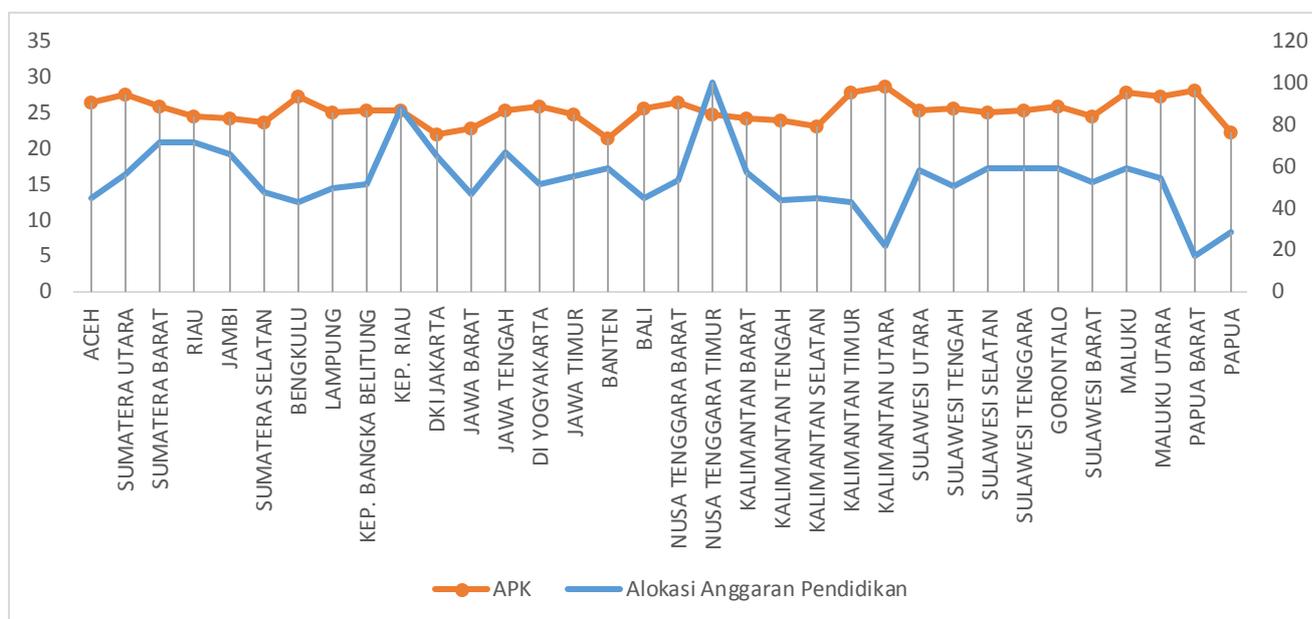
Kelompok	2015	2016	2017	2018	2019
Kuintil 1	59,74	62,44	65,82	62,87	71,35
Kuintil 2	71,39	75,46	77,07	76,00	80,41
Kuintil 3	78,66	81,41	86,67	84,48	85,69
Kuintil 4	87,66	91,68	89,60	86,22	89,53
Kuintil 5	92,82	94,44	94,27	94,26	92,72

Sumber: Badan Pusat Statistika

Ekonomi suatu rumah tangga memiliki peran penting dalam menentukan pendidikan anggota rumah tangga tersebut. Status ekonomi rumah tangga digolongkan menjadi lima kuintil. Kuintil I dan II untuk status ekonomi terendah, kuintil III dan IV untuk status ekonomi menengah, dan kuintil V untuk status ekonomi tertinggi (Badan Pusat Statistik, 2018). Data menunjukkan adanya kesenjangan angka partisipasi kasar antar status ekonomi rumah tangga yang berbeda. Semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi nilai angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Masyarakat dengan kelompok pendapatan 20% terbawah atau kuintil satu memiliki angka partisipasi kasar yang terendah dan perbedaan jarak yang tinggi antar kelompok dibandingkan dengan kelompok lainnya.

CNBC Indonesia yang mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyatakan adanya kenaikan rata-rata uang pangkal pendidikan di Indonesia mencapai 10-15% per tahunnya (Tim Redaksi CNBC Indonesia 2020). Data menunjukkan bukan hanya biaya pendidikan yang terus meningkat, tetapi biaya-biaya yang menunjang keberlangsungan proses belajar turut naik, sehingga mengakibatkan biaya yang dikeluarkan untuk dapat bersekolah menjadi lebih besar. Keadaan masyarakat yang berada dalam kemiskinan mengalami banyak keterbatasan, salah satunya ialah keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan.

Pendidikan merupakan kunci sebagai penentu kualitas sumber daya manusia di suatu Negara, untuk itu Pemerintah melalui instrumen APBN, telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sejalan dengan penerapan mandatory spending. Anggaran bidang pendidikan dalam APBN telah dialokasikan minimal sebesar 20 persen terhadap belanja negara sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4 sejak tahun 2009 (Kementerian Keuangan, 2018). Tujuan ditetapkannya *mandatory spending* ini ialah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, salah satunya membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.



Gambar 1. Grafik Anggaran pendidikan 2019 dan APK 2019 per provinsi

Sumber: BPS 2019 dan Neraca Pendidikan Daerah 2019 (Data diolah).

Anggaran pendidikan yang besar tidak menjamin partisipasi pendidikan tinggi. Melihat dari data, Provinsi DKI Jakarta memiliki Alokasi anggaran pendidikan terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, tetapi Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai APK jenjang SMA yang rendah yaitu 74.77 masih berada dibawah rata-rata APK nasional yaitu 83.98. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki anggaran pendidikan yang tinggi dan memiliki nilai APK jenjang SMA

yaitu 84.63 dan berada di atas rata-rata nasional. Tinggi rendahnya rata-rata anggaran pendidikan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (PAD), alokasi dana dekonsentrasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi serta jumlah anak usia sekolah (Koto, 2015).

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penelitian ini akan menguji pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas. Peneliti mengambil studi kasus pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2015-2019. Angka Partisipasi Kasar (APK) dipilih sebagai variabel penelitian untuk mengetahui banyaknya masyarakat yang sedang menempuh jenjang pendidikan SMA tanpa memandang batasan umur. Selain untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada suatu jenjang pendidikan, angka partisipasi kasar dapat menjadi acuan untuk melihat pemerataan dan perluasan akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat. Angka Partisipasi Kasar pada tingkat SMA dipilih peneliti karena ada kesenjangan partisipasi sekolah antar kelompok golongan ekonomi di Indonesia. Selain itu, Angka Partisipasi Kasar pada tingkat sekolah menengah atas memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesempatan lebih tinggi untuk memenuhi kriteria perekrutan perusahaan, sementara pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin tidak memenuhi tuntutan dengan mudah (ILO, 2015).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kemiskinan dengan Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMA di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh alokasi anggaran pendidikan dengan Angka Partisipasi Kasar tingkat SMA di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh alokasi anggaran pendidikan dengan kemiskinan di Indonesia?

4. Apakah terdapat pengaruh kemiskinan dan alokasi anggaran pendidikan dengan Angka Partisipasi Kasar SMA di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (valid, benar) dan dapat dipercaya tentang :

1. Mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap angka partisipasi kasar tingkat sekolah menengah atas di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh alokasi anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi kasar sekolah menengah atas di indonesia.
3. Mengetahui pengaruh alokasi anggaran pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh kemiskinan dan alokasi anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi kasar tingkat sekolah menengah atas di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Angka Partisipasi Kasar

Badan Pusat Statistik Indonesia mendefinisikan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007 BPS menetapkan Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan dalam perhitungan Angka Partisipasi Kasar.

UNESCO mendefinisikan Gross Enrolment Ratio (GER) atau Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai jumlah siswa yang terdaftar dalam tingkat pendidikan tertentu, tanpa memandang usia, dinyatakan sebagai persentase dari populasi usia sekolah resmi yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang sama. Angka Partisipasi Kasar yang tinggi umumnya menunjukkan tingkat partisipasi

yang tinggi, baik siswa tersebut termasuk dalam kelompok usia sekolah resmi atau tidak resmi. APK di setiap jenjang pendidikan harus didasarkan pada total partisipasi di semua jenis sekolah dan lembaga pendidikan, termasuk negeri, swasta dan semua lembaga lain yang menyelenggarakan program pendidikan terorganisir (UNESCO, 2020).

APK dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Rumus perhitungan angka partisipasi kasar dapat dinyatakan sebagai berikut

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$
$$\text{APK SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$
$$\text{APK SM} = \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$
$$\text{APK PT} = \frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

Gambar 2. Rumus Angka Partisipasi Kasar

Sumber: BPS.

Kemiskinan

Menurut Hamudy ada beragam definisi mengenai kemiskinan, mulai dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multiface atau multi dimensional (Hamudy, 2008).

Menurut Bappenas (2004) dalam (Purwanto, 2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Badan Pusat Statistik memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik, 2019). Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, BPS mengklasifikasikan ada tiga indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- 1) Head Count Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)
- 2) Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- 3) Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, menandakan semakin besar ketimpangan pengeluaran penduduk miskin.

Alokasi Anggaran Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai amanat UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat (1) (UU Nomor 20 Tahun 2003). Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sama-sama bertanggung jawab

menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak tahun 2009, anggaran pendidikan yang disusun dalam postur APBN dilandasi oleh:

- 1) Amanat Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, Pasal 31 ayat (4), yang mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No 024/PUU-V/ 2007, tanggal 20 Februari 2008, “Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.”
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Anggaran Pendidikan daerah berasal dari dana daerah dan transfer daerah bidang pendidikan. Dana daerah yaitu anggaran pendidikan yang dialokasikan di dinas pendidikan yang bukan berasal dari belanja negara. Sedangkan transfer daerah bidang pendidikan yaitu bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian di bidang pendidikan (Kemdikbud, 2019).

Dalam rangka menjaga kesinambungan pendidikan warga negara Republik Indonesia dan memperkuat daya saing bangsa, Pemerintah mengambil langkah strategis untuk melaksanakan Pendidikan Menengah Universal. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan

yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013).

Dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa pendanaan PMU meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Pendanaan penyelenggaraan PMU merupakan tanggungjawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber dana penyelenggaraan PMU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masyarakat dan/atau sumber lain yang sah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013).

Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Kasar

Dalam studi milik World Bank menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dan orang tua dengan pendidikan rendah menghadapi kemungkinan yang relatif tinggi untuk mencapai tingkat pendidikan yang rendah dan memperoleh hasil yang lebih rendah untuk pendidikan mereka (World Bank, 2004). Penduduk miskin sering kali berada dalam kondisi kesehatan yang buruk, yang dapat menurunkan produktivitas mereka dan menghambat kemampuan mereka untuk mengelola dan menghasilkan pengetahuan. Dalam buku *Poverty reduction and growth: virtuous and vicious circles* disebutkan bahwa keluarga dengan pendidikan rendah (khususnya mereka yang berpendidikan kurang dari sekolah menengah) cenderung miskin, dan pada gilirannya mereka cenderung tidak berinvestasi dengan cukup untuk pendidikan mereka dan anak-anak mereka untuk keluar dari kemiskinan (Perry, Lopez, Maloney, Arias, & Serven, 2006).

Alokasi Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar

Pemerintah berkewajiban menyediakan alokasi anggaran belanja pada sektor pendidikan untuk membangun sarana dan prasarana guna melakukan investasi dalam bentuk modal manusia. Michael Todaro dan Stephen Smith menyebutkan modal manusia merupakan investasi produktif terhadap orang-orang; mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan gagasan (M. Todaro &

Smith, 2011). Menurut Todaro dan Smith investasi modal manusia melalui pendidikan menimbulkan biaya dan manfaat individu serta biaya dan manfaat sosial pendidikan (M. Todaro & Smith, 2006).

Alokasi Anggaran Pendidikan terhadap Kemiskinan

Rostow dan Musgrave dalam (Mangkoesebroto, 2016) mengembangkan teori pembangunan dengan menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan pembangunan ekonomi. Pada tahap awal, investasi pemerintah lebih besar karena pada tahap ini pemerintah harus membangun infrastruktur seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Kemiskinan dan Alokasi Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar

Todaro dan Smith dalam bukunya *Economic development: The Addison-Wesley series in economics* berpendapat bahwa tingkat pendidikan yang diterima seseorang ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran (M. P. Todaro & Smith, 2015). Di sisi permintaan, terdapat dua pengaruh yang mempengaruhi jumlah sekolah yang diinginkan. adalah (1) prospek siswa yang lebih berpendidikan untuk memperoleh pendapatan yang jauh lebih banyak melalui pekerjaan sektor modern di masa depan (manfaat pendidikan pribadi keluarga) dan (2) biaya

pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung, yang harus ditanggung oleh siswa atau keluarga untuk menempuh pendidikan

Todaro dan Smith menjelaskan bahwa, pada sisi penawaran (oleh negara), pendidikan di pengaruhi oleh tingkat pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Jumlah sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan universitas yang tersedia dapat mempengaruhi tingkat pendidikan yang diterima oleh seseorang.

Hipotesis Penelitian

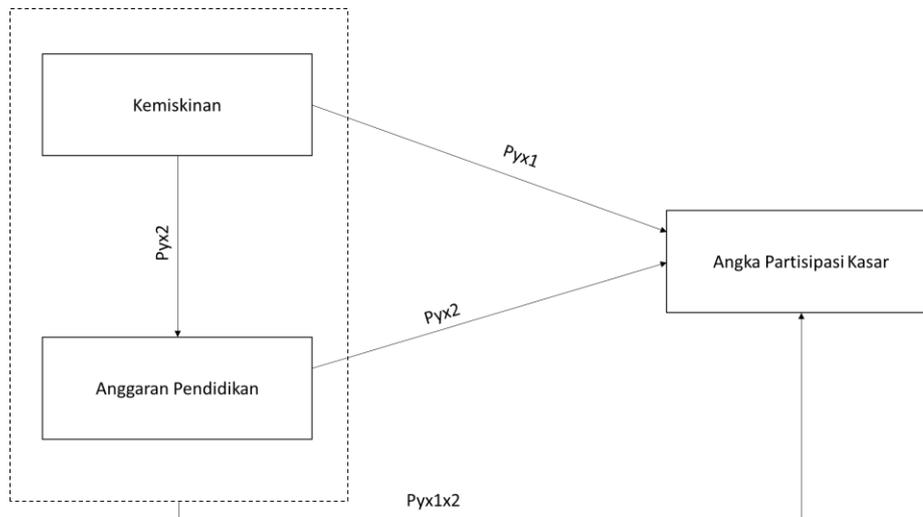
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah pada penelitian hingga terbukti akurat melalui data yang sudah terkumpul dan diolah. Berdasarkan penjelasan teori, penelitian yang relevan, dan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H1: Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap Angka Partisipasi Kasar.

H2: Alokasi Anggaran Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Angka Partisipasi Kasar.

H3: Alokasi Anggaran Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

H4: Kemiskinan dan Alokasi Anggaran Pendidikan bersama-sama berpengaruh positif terhadap Angka Partisipasi Kasar.



Gambar 3. Kerangka Teoritik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengkaji Angka Partisipasi Kasar pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2015-2019. Penelitian ini akan berfokus pada pengaruh kemiskinan dan alokasi anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi kasar pada 34 provinsi di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif karena data penelitian yang digunakan berupa angka-angka. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2012). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur.

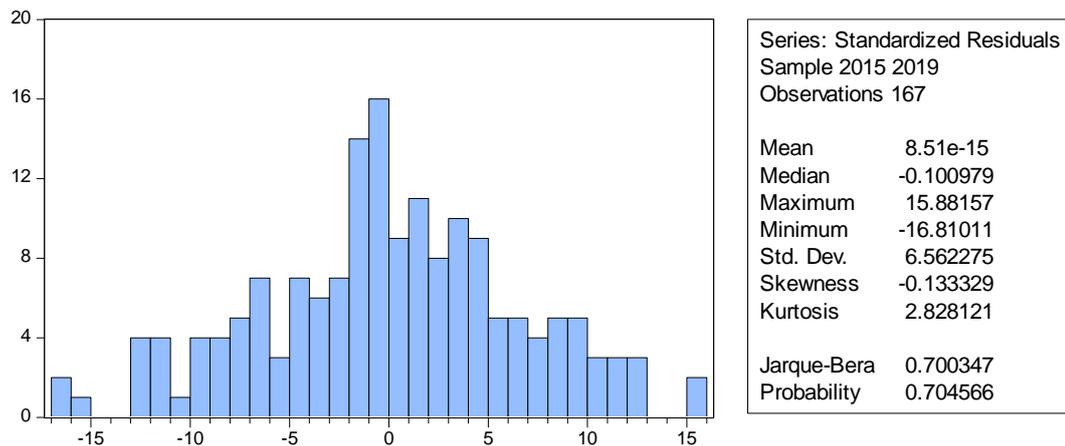
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan untuk melakukan penafsiran. Suatu model dikatakan layak apabila

bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) yaitu memenuhi asumsi klasik atau terhindar dari masalah-masalah multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas



Gambar 4. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diolah menggunakan *evIEWS 9*

Berdasarkan Gambar 4.1 Diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,700341 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai probabilitas Jarque-Bera 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi pada penelitian ini memiliki distribusi data yang normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

	Alokasi Anggaran Pendidikan	Kemiskinan
Alokasi Anggaran Pendidikan	1.000000	-0.224419
Kemiskinan	-0.224419	1.000000

Sumber: Hasil Correlations *EvIEWS 9*, data diolah

Dari hasil pengujian pada tabel 4.6. yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa nilai kolerasi antar variabel bebas (Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kemiskinan) lebih kecil dari 0,09 yaitu -0.224419. Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa variabel Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kemiskinan terbebas dari masalah multikolinieritas, sehingga model ini tidak mengandung masalah multikolinieritas atau tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Glejser

Dependent Variable: RESABS				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.26376	5.348140	1.919126	0.0571
KEM	-0.363188	0.446509	-0.813394	0.4175
AAP	-0.109790	0.056696	-1.936469	0.0550

Sumber: Hasil olahan *eviews 9*

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai prob. dari masing-masing variabel bebas (Kemiskinan dan Alokasi Anggaran Pendidikan) lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model ini tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

Analisis Jalur

1. Strukturan 1 : Pengaruh Kemiskinan dan Alokasi Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar

Tabel 4. Pengaruh Kemiskinan dan Alokasi Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar SMA

Dependent Variable: APK			
Variable	Coefficient	t-statistic	Prob.
C	98.11966	16.92831	0.0000
KEM	-1.390168	-0.400114	*0.0047
ANG	0.101843	1.657434	**0.0998
R-squared	0.833391		
Adjusted R-squared	0.788877		
F-statistic	18.72205		
Prob(F-statistic)	0.000000		
Obs	168		

Sumber: Hasil olah data *eviews 9* (terlampir)

Keterangan: * signifikansi pada 5%, ** signifikansi pada 10%

Pada tahap pengujian tabel di atas dapat diperoleh nilai koefisien sehingga diperoleh persamaan $APK = 98,11966 - 1,390168(X_1) + 0,101843(X_2) + e$. Dari hasil persamaan di atas menunjukkan bahwa pengaruh kemiskinan terhadap APK memiliki koefisien regresi bernilai negatif sebesar -1,390168 dengan

probabilitas sebesar 0,0047 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai signifikan 5%. Pengaruh alokasi anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi kasar memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,101843 dengan probability sebesar 0,0998 yang lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan dengan nilai signifikansi 5%, namun signifikan dengan nilai signifikansi 10%. Pada persamaan regresi kemiskinan dimana APK merupakan variabel dependen diperoleh hasil negatif sebesar -1,390168. Pada persamaan regresi alokasi anggaran pendidikan dimana APK sebagai variabel dependen diperoleh hasil koefisien positif sebesar 0,101843.

Berdasarkan Tabel 4.9 Diperoleh hasil estimasi kemiskinan memiliki t hitung sebesar -0,400114 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0047 dengan koefisien 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil daripada t tabel ($0,400114 > 1,65414$) dengan nilai signifikansi ($0,0047 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap angka partisipasi kasar.

Berdasarkan Tabel 4.10 Diperoleh hasil estimasi alokasi anggaran pendidikan memiliki t hitung sebesar 1,657434 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 dengan koefisien 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil daripada t tabel ($4,200361 > 1,65414$) dengan nilai signifikansi ($0,0998 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, alokasi anggaran pendidikan berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap angka partisipasi kasar.

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.11 dihasilkan F hitung sebesar 18,72205 dengan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000000. Hasil ini menunjukkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel ($18,72205 \geq 3,05$) dengan nilai signifikansi ($0,000000 < 0,05$). Maka variabel kemiskinan dan alokasi anggaran pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap angka partisipasi kasar. Berdasarkan hipotesis yang diajukan menolak H_0 dan menerima H_a yang artinya bahwa variabel bebas secara simultan mempengaruhi angka partisipasi kasar.

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,833391. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel kemiskinan dan alokasi anggaran pendidikan mampu menjelaskan variasi variabel angka partisipasi kasar sebesar 83,3%.

2. Strukturan 2 : Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan terhadap Kemiskinan.

Tabel 5. Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan terhadap Kemiskinan

Dependent Variable: KEM			
Variable	Coefficient	t-statistic	Prob.
C	11.92667	124.0971	0.0000
ANG	-0.083336	-9.994037	0.0000
R-squared	0.992958		
Obs	168		

Sumber: Hasil olah data *eviews 9* (terlampir)

Pada tahap pengujian tabel diatas diperoleh persamaan $KEM = 11.92667 - 0.083336 + e$. Pengaruh Dari persamaan tersebut ialah nilai koefisien untuk variabel alokasi anggaran pendidikan (X_2) sebesar -0.083336 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kenaikan alokasi anggaran pendidikan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan maka akan diikuti dengan penurunan kemiskinan sebesar 0.083336 satuan.

Berdasarkan Tabel 4.12 diperoleh hasil estimasi alokasi anggaran pendidikan memiliki t hitung sebesar 9.994037 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 dengan koefisien 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil daripada t tabel ($9.994037 > 1.65408$) dengan nilai signifikansi ($0,0000 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, alokasi anggaran pendidikan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.992958. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel alokasi anggaran pendidikan mampu menjelaskan variasi variabel kemiskinan sebesar 99,3%.

Menghitung Pengaruh Langsung (Direct Effect)

1. Pengaruh Kemiskinan (X1) terhadap Angka Partisipasi Kasar (Y)

Tabel 6. Pengaruh Langsung Kemiskinan (X1) terhadap Angka Partisipasi Kasar (Y)

Dependent Variable: APK			
Variable	Coefficient	t-statistic	Prob.
C	104.9841	25.38192	0.0000
KEM	-1.897758	-5.150247	0.0000
Obs	168		

Sumber: Hasil olah data eviews 9 (terlampir)

Hasil pengujian menggunakan metode data panel yang ditunjukkan pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa angka koefisien regresi variabel kemiskinan adalah sebesar -1.897758 dengan probability sebesar 0,0000 signifikan dengan signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan kemiskinan sebesar satu persen dengan asumsi variabel lainnya konstan akan diikuti dengan penurunan angka partisipasi kasar jenjang SMA sebesar 1.89 persen. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh langsung secara negatif signifikan terhadap angka partisipasi kasar tingkat SMA.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian milik Ummy Zulfa Rahmatin dan Ady Soejoto yang meneliti pengaruh tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah terhadap angka partisipasi sekolah. Hasil penelitian ini melalui uji regresi menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan negatif terhadap angka partisipasi sekolah. Pengaruh perubahan angka partisipasi sekolah yang disebabkan faktor tingkat kemiskinan berkontribusi sebesar 22,62% (Rahmatin, & Soejoto, 2017).

Penelitian milik Khairunnisa (2014) dengan judul Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat. Hasil regresi penelitian ini menunjukkan perubahan variabel kemiskinan berpengaruh negatif terhadap tingkat partisipasi sekolah SMP. Peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 1% akan menurunkan nilai partisipasi sekolah smp sebesar 0,19%. Penelitian ini menyebutkan bahwa wilayah dengan tingkat kemiskinan yang rendah dapat mencapai angka paertisipasi sekolah SMP yang tinggi (Khairunnisa, 2014)

Kemiskinan mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk pendidikan. Goranddo et al menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan, memerlukan biaya yang lebih tinggi pula sehingga masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk biaya sekolah anggota keluarga yang menyebabkan sulitnya untuk menyekolahkan ke tingkat yang lebih tinggi (Granado, Fengler, Ragatz, & Yavuz, 2007). Hal ini membuktikan bahwa kemiskinan dapat mempengaruhi angka partisipasi kasar jenjang sekolah menengah atas.

2. Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan (X2) terhadap Angka Partisipasi Kasar (Y)

Tabel 7. Pengaruh Langsung Alokasi Anggaran Pendidikan (X2) terhadap Angka Partisipasi Kasar (Y)

Dependent Variable: APK			
Variable	Coefficient	t-statistic	Prob.
C	81.56759	147.5989	0.0000
ANG	0.219461	4.576186	0.0000
Obs	168		

Sumber: Hasil olah data eviews 9 (terlampir)

Hasil pengujian menggunakan metode data panel yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel alokasi anggaran pendidikan adalah sebesar 0.219461 dengan probability sebesar 0.0000. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel alokasi anggaran pendidikan berpengaruh langsung secara signifikan tingkat signifikansi 5% terhadap angka partisipasi kasar jenjang SMA. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan alokasi anggaran pendidikan sebesar satu persen akan diikuti dengan kenaikan angka partisipasi kasar jenjang SMA sebesar 0,1%.

Hasil ini sejalan dengan penelitian milik Jolianis dengan judul Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga Terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dengan hasil bahwa dengan adanya peningkatan anggaran pendidikan dalam setiap satuannya akan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah (Y) sebesar 1,132 dalam setiap satuannya (Koto, 215).

Penelitian milik (Wawan Hermawan, 2020) dengan judul Determinan Angka Partisipasi Murni: Studi pada Penduduk Miskin Tingkat Provinsi di Indonesia menunjukkan adanya pengaruh signifikan secara statistik, untuk semua jenjang pendidikan. variabel pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang memiliki pengaruh relatif besar ditunjukkan oleh Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang mempunyai dampak positif pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap angka partisipasi murid SD dan SMP dan serta SMA.

Pengalokasian anggaran pendidikan untuk jenjang sekolah menengah atas merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal. Peraturan penganggaran ini ditetapkan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal (2) ayat 2 menyebutkan bahwa sasaran penyelenggaraan PMU adalah setiap warga negara Indonesia usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah.

Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan (X2) terhadap Kemiskinan

Tabel 8. Pengaruh Langsung Alokasi Anggaran Pendidikan (X2) terhadap Kemiskinan (X1)

Dependent Variable: KEM			
Variable	Coefficient	t-statistic	Prob.
C	11.92667	124.0971	0.0000
ANG	-0.083336	-9.994037	0.0000
Obs	168		

Sumber: Hasil olah data eviews 9 (terlampir)

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel alokasi anggaran pendidikan adalah sebesar -0.083336 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel alokasi

anggaran pendidikan berpengaruh langsung secara negatif signifikan tingkat signifikansi 5% terhadap kemiskinan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian milik Paulo Grasio Izaak Kawatu, Daisy S. M. Engka, Krest D. Tolosang dengan judul Pengaruh Anggaran Kesehatan, Pendidikan Dan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Minahasa (Studi Pada Kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) 2018. Penelitian tersebut membuktikan bahwa kebijakan di bidang Pendidikan memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa, atau dengan kata lain kebijakan di bidang pendidikan yaitu Kartu Indonesia Pintar(KIP) memberikan pengaruh dalam penurunan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa (Kawatu et.al, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Mardiana, Theresia Militina, Anis Rachma Utary Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan dengan hasil Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, Pengeluaran anggaran bidang pendidikan berpengaruh langsung dan tidak signifikan dengan nilai pengaruh -0.570 dan signifikansi $0,216 > 0,050$. Dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, Pengeluaran anggaran bidang pendidikan berpengaruh langsung dan tidak signifikan dengan nilai pengaruh $0,239$ dan signifikansi $0,623 > 0,050$ (Mardiana et.al, 2017).

Pengaruh Kemiskinan dan Alokasi Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,833391$ dengan *probability* sebesar $0,000000$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel kemiskinan dan alokasi anggaran pendidikan mampu menjelaskan variasi variabel angka partisipasi kasar sebesar $83,3\%$. Nilai ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari

kemiskinan dan alokasi anggaran pendidikan secara bersama-sama terhadap angka partisipasi kasar tingkat sekolah menengah atas.

Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Sobel test merupakan uji untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Pengaruh tidak langsung kemiskinan (X1) terhadap angka partisipasi kasar (Y) melalui alokasi anggaran pendidikan (X2) dapat dihitung dengan melakukan uji sobel.

	Test statistic:	Std. Error:	p-value:
Sobel test:	-1.63510349	0.00519061	0.10202735

Gambar 4. Hasil Uji Sobel

Sumber : *Calculation for the sobel test via <http://quantpsy.org/>*

Dari hasil perhitungan sobel menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan tidak dapat memediasi hubungan pengaruh kemiskinan terhadap angka partisipasi kasar dengan melihat hasil uji t sebesar 1.63510 yang lebih kecil dari 1.65408 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.102 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi 0.05.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kemiskinan dan alokasi anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi kasar tingkat sekolah menengah atas di Indonesia tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kemiskinan memiliki pengaruh langsung secara negatif signifikan terhadap angka partisipasi kasar tingkat SMA di Indonesia tahun 2015-2019. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai koefisien regresi variabel kemiskinan adalah sebesar -1.897758 dengan *probability* sebesar 0.0000. Hal ini menunjukkan

bahwa setiap kenaikan kemiskinan sebesar satu persen dengan asumsi variabel lainnya konstan akan diikuti dengan penurunan angka partisipasi kasar jenjang SMA sebesar 1.89 persen.

2. Alokasi Anggaran Pendidikan memiliki pengaruh langsung positif signifikan terhadap angka partisipasi kasar tingkat SMA tahun 2015-2019. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi variabel alokasi anggaran pendidikan sebesar 0.219461 dengan *probability* sebesar 0.0000. Setiap kenaikan alokasi anggaran pendidikan sebesar satu persen akan diikuti dengan kenaikan angka partisipasi kasar jenjang SMA sebesar 0,21%.
3. Alokasi Anggaran Pendidikan memiliki pengaruh langsung negatif signifikan terhadap kemiskinan tahun 2015-2019. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi variabel alokasi anggaran pendidikan sebesar -0.083336 dengan *probability* sebesar 0.0000. Setiap kenaikan alokasi anggaran pendidikan sebesar satu persen akan diikuti dengan penurunan kemiskinan sebesar 0,08%.
4. Kemiskinan dan Alokasi Anggaran Pendidikan secara simultan memiliki pengaruh terhadap angka partisipasi kasar tingkat sma tahun 2015-2019. Nilai pengaruh dapat yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,833391. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel kemiskinan dan alokasi anggaran pendidikan mampu menjelaskan variasi variabel angka partisipasi kasar sebesar 83,3%.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya meningkatkan angka partisipasi kasar di Indonesia
2. Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan menengah atas, Pemerintah hendaknya menuntaskan regulasi wajib

belajar 12 tahun agar masyarakat dapat dengan mudah menamatkan pendidikan setara sekolah menengah atas.

3. Perluasan akses pendidikan untuk semua kalangan tanpa memandang latar belakang ekonomi masih harus ditingkatkan karena kemiskinan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas belajar tingkat SMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Angka Partisipasi Sekolah (APS). Retrieved from <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/569>
- Bappeda Banten. (2018). Kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (Apm) Pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah Di Provinsi Banten.
- ILO. (2015). *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2013*. Retrieved from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233250.pdf
- Kawatu Paulo Grasio Izaak, Engka Daisy S. M, Krest D. Tolosang. (2018). Pengaruh Anggaran Kesehatan, Pendidikan Dan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Minahasa (Studi Pada Kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, vol 1, No 3 2018*.
- Kemdikbud. (2019). Neraca Pendidikan Daerah 2019. *Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Tengah*, 1–2. Retrieved from <https://npd.kemdikbud.go.id/>
- Kementerian Keuangan. (2018). *Reviu Belanja Kementerian/Lembaga Bidang Pendidikan Dalam Terminologi Value For Money*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal, 7. Retrieved from http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/permen_tahun2013_nomor80.pdf
- Khairunnisa, Khairunnisa, et al. "Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP Di Jawa Barat." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, vol. 15, no. 1, 1 Jul. 2014, pp. 91-112.
- Koto, J. (2015). Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Economica*. <https://doi.org/10.22202/Economica.2015.V3.I2.254>.

- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mangkoesebroto, G. (2016). *Ekonomi Publik (Ketiga)*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Mardiana Mardiana, Theresia Militina, Anis Rachma Utary. (2007). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen: INOVASI, vol 13, No 1 2017*.
- Perry, G. E., Lopez, J. H., Maloney, W. F., Arias, O., & Serven, L. (2006). *Poverty Reduction and Growth. Poverty Reduction and Growth*.
<https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6511-3>
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development: The Addison-Wesley series in economics*.
- Todaro, M., & Smith, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi 11*. Jakarta: Erlangga.
- UNESCO. (2009). *2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics*. UNESCO Institute for Statistics.
- UU Nomor 20 Tahun 2003. (2003). Sistem pendidikan nasional. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
<https://doi.org/10.1016/j.yjmed.2008.01.025>
- Wawan Hermawan, Indra Maipita, Setyo Tri Wahyudi (2020). Determinan Angka Partisipasi Murni: Studi Pada Penduduk Miskin Tingkat Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan (JIEP) vol, 2 No 1 2020*.

